

**RINGKASAN EKSEKUTIF
INDEKS PEMBANGUNAN DESA (IPD)
KABUPATEN SEMARANG 2018**



<https://semara>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SEMARANG**

Ringkasan Eksekutif Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kabupaten Semarang 2018

ISSN/ISBN : -

No. Publikasi : 33220.2015

Katalog : 1105023.3322

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : ii + 16 halaman

Naskah :

BPS Kabupaten Semarang

Penyunting :

BPS Kabupaten Semarang

Desain Kover oleh :

BPS Kabupaten Semarang

Penerbit :

BPS Kabupaten Semarang

Pencetak :

Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi : -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

RINGKASAN EKSEKUTIF INDEKS PEMBANGUNAN DESA (IPD) KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018

Desa, sebagai wilayah administrasi terendah secara mandiri telah dijadikan subyek pembangunan. Tujuannya mengurangi kesenjangan pembangunan perdesaan dan perkotaan yang cenderung bias perkotaan (urban bias). Selain itu, mendekatkan pelayanan pemerintahan di tingkat desa, supaya menjadi solusi bagi perubahan sosial ekonomi desa. Desa sebagai subyek pembangunan, diharapkan mampu mendekatkan pelayanan terhadap warga melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan. Mulai dari menggerakkan perekonomian, membangun sarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana energi, transportasi, dan komunikasi, serta sarana lain yang dibutuhkan. Sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri. Desa yang mandiri dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pelaksanaannya, diatur dalam RPJMN 2015–2019, yang menempatkan desa menjadi sasaran kemajuan wilayah. Tujuannya untuk: (1) memetakan kondisi desa di Indonesia berdasarkan tingkat perkembangannya; (2) menetapkan target/sasaran pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan yang harus dicapai secara bersama–sama oleh para pelaku pembangunan desa; dan (3) memotret kinerja pembangunan yang sudah

dilaksanakan di desa. Mewujudkan amanah tersebut, diperlukan ukuran yang diwujudkan dalam Indeks Pembangunan Desa (IPD).

Apa itu Indeks Pembangunan Desa?

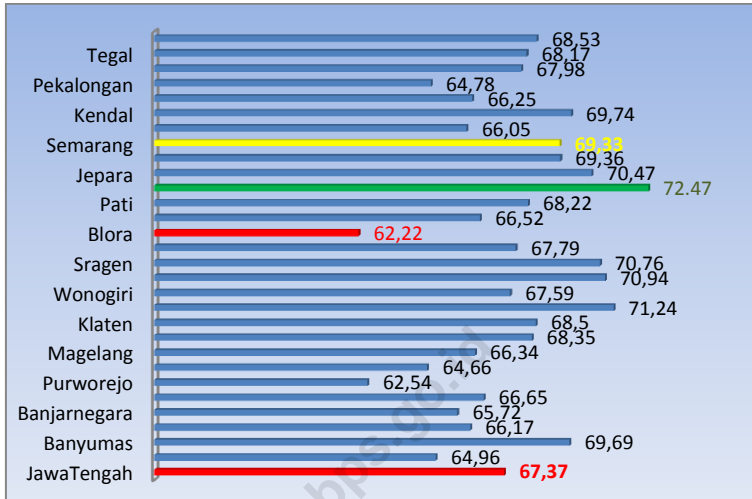
Indeks Pembangunan Desa adalah Indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. Tahun 2015 Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merilis data Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2014 dan tahun 2019 dirilis lagi Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2018. Dengan basis teori Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dimensi dan Variabel Indeks Pembangunan Desa

Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan data kewilayahan kaya informasi dan dapat dijadikan bahan

mengidentifikasi kondisi pembangunan desa di satu waktu. Data dasar penyusun IPD adalah data Potensi Desa 2018 yang bersumber dari BPS. Indeks yang menggunakan “Desa” sebagai unit analisis ini mencakup 5 (lima) dimensi yang saling melengkapi antara lain pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas /transportasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Kelima dimensi tersebut disusun dari 42 (empat puluh dua) indikator yang menggambarkan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan pada masyarakat desa.

IPD Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2018



Sumber : Indeks Pembangunan Desa Tahun 2018

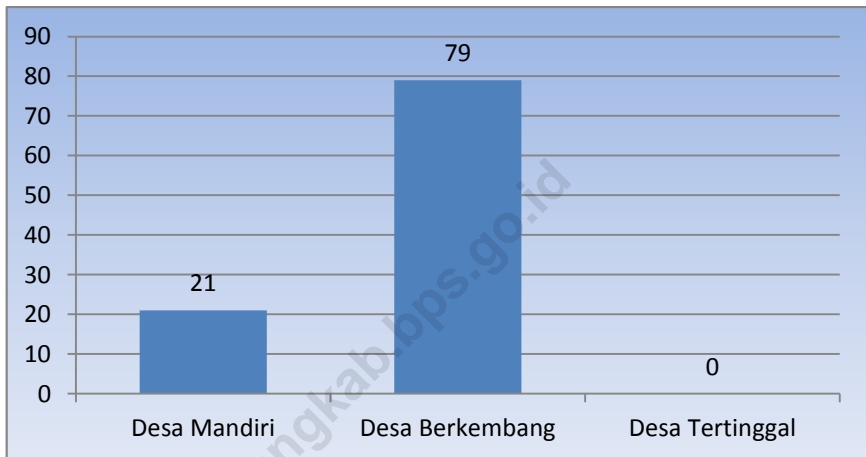
Pada tahun 2018 secara daerah, tahap pembangunan desa di Provinsi Jawa Tengah termasuk kategori berkembang dengan nilai IPD 67,37. Nilai IPD tertinggi yaitu Kabupaten Kudus dengan nilai IPD 72,47, sedangkan Kabupaten Blora memiliki nilai IPD paling rendah yaitu 62,22.

IPD disusun untuk menunjukkan tingkat perkembangan pembangunan di suatu desa. Nilai indeks mempunyai rentang 0 s/d 100. Untuk memudahkan interpretasi, maka dilakukan pengelompokan desa menjadi 3 kategori yaitu desa mandiri, desa berkembang, dan desa tertinggal.

Kabupaten Semarang memiliki nilai IPD sebesar 69,33. Hal ini menunjukkan bahwa IPD Kabupaten Semarang di atas rata – rata nilai IPD Kabupaten se Jawa Tengah. Kabupaten Semarang yang terletak di wilayah topografi dataran tinggi dan pegunungan secara

umum termasuk Desa Berkembang, hal ini tercermin dari IPD sebesar 69,33.

Persentase Desa Berdasarkan Status Indeks Pembangunan Desa (IPD) Di Kabupaten Semarang Tahun 2018



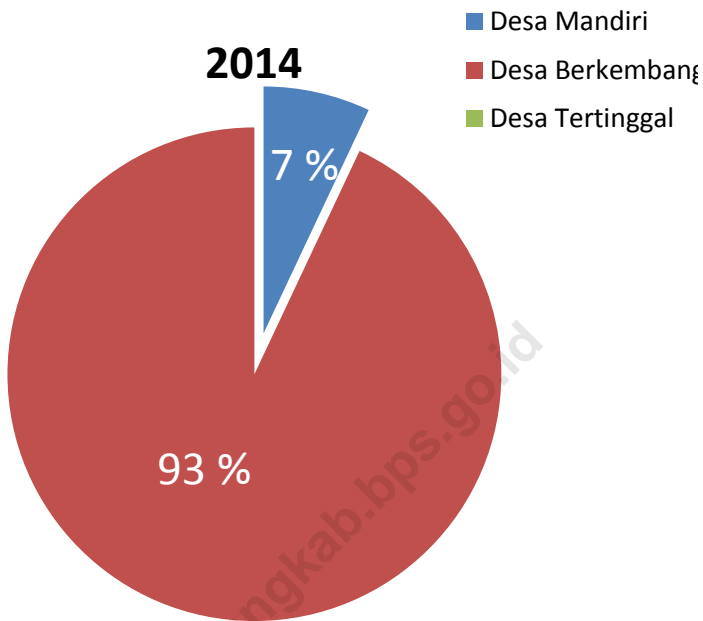
Sumber : Indeks Pembangunan Desa Tahun 2018

Di Kabupaten Semarang terdapat sebanyak 208 desa yang tersebar di 19 kecamatan. Dari 208 desa tersebut sebanyak 79 persen adalah desa berkembang, 21 persen merupakan desa mandiri, sedangkan desa tertinggal di Kabupaten Semarang sudah tidak ada. Hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam membangun desa dengan berbagai program. Salah satu yang mendukung perkembangan desa adalah keberadaan Alokasi Dana Desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa pemerintah desa dapat recencanakan program pembangunan desa dengan lebih tepat sasaran.

Desa terbagi menjadi 3 Kategori :

1. **Desa Mandiri** adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/ transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Secara teknis, desa mandiri merupakan desa dengan nilai IPD lebih dari 75.
2. **Desa Berkembang** yaitu desa mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/ transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang cukup memadai. Secara teknis, desa berkembang merupakan desa yang memiliki nilai IPD lebih dari 50 namun kurang dari atau sama dengan 75.
3. **Desa Tertinggal** yaitu desa mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas /transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. Secara teknis, desa tertinggal merupakan desa yang memiliki nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50.

Persentase Perkembangan Jumlah Desa Tahun 2014 dan 2018 Menurut Kategori Desa



Sumber : Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 dan Tahun 2018

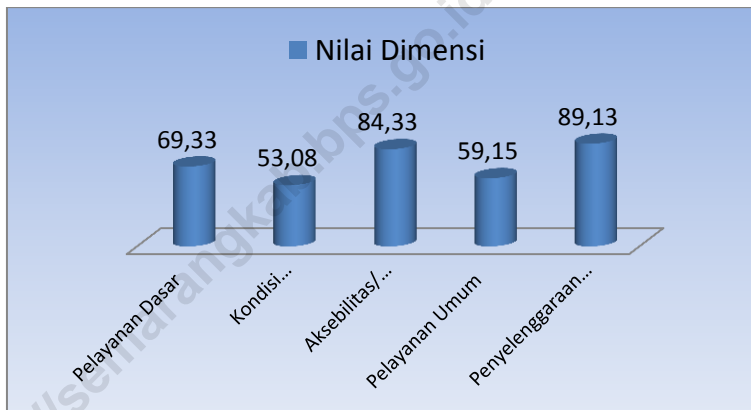
Melihat perkembangan pembangunan desa secara panel di Kabupaten Semarang antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 cukup signifikan. Pada tahun 2014 sudah tidak ada desa tertinggal di Kabupaten Semarang, dengan

jumlah desa berkembang sebanyak 93 persen dan desa mandiri hanya 7 persen. Pada tahun 2018 jumlah desa mandiri bertambah

Pembangunan Desa menjadi bagian penting yang menjadi target pemerintah, tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Tujuan pembangunan desa ini untuk mengurangi jumlah desa tertinggal meningkatkan jumlah desa mandiri

menjadi 21 persen dan jumlah desa berkembang sebanyak 79 persen. Hal ini berarti bahwa selama periode waktu tahun 2014 sampai tahun 2018 sebanyak 14 persen desa di Kabupaten Semarang meningkat, dari desa berkembang menjadi desa mandiri. Dengan hasil tersebut diharapkan kedepannya perkembangan desa akan semakin meningkat, dengan target desa mandiri akan semakin banyak di Kabupaten Semarang.

Dimensi dari Indeks Pembangunan Desa Tahun 2018



Sumber : Indeks Pembanguna Desa Tahun 2018

Indeks Pembangunan Desa Terdiri dari lima Dimensi :

1. Pelayanan Dasar

Mewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan bagian dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan kesehatan

2. Kondisi Infrastruktur

mewakili Kebutuhan Dasar; Sarana; Prasarana; Pengembangan Ekonomi Lokal; dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan dengan memisahkan aspek aksesibilitas/ transportasi

3. Aksesibilitas/Transportasi

dipisahkan sebagai dimensi tersendiri dalam indikator pembangunan desa dengan pertimbangan sarana dan prasarana transportasi memiliki kekhususan dan prioritas pembangunan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi dalam desa.

4. Pelayanan Umum

merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Karena kekhususannya

5. Penyelenggaraan Pemerintahan

mewakili indikasi kinerja pemerintahan desa merupakan bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara pelayanan bagi warga yang dalam hal ini adalah Pemerintah

Dari lima Dimensi Indeks Pembangunan Desa yang paling tinggi yaitu dimensi penyelenggaraan pemerintah dengan nilai indeks sebesar 89,13. Dimensi aksesibilitas transportasi juga tinggi dengan nilai indeks sebesar 84,33.

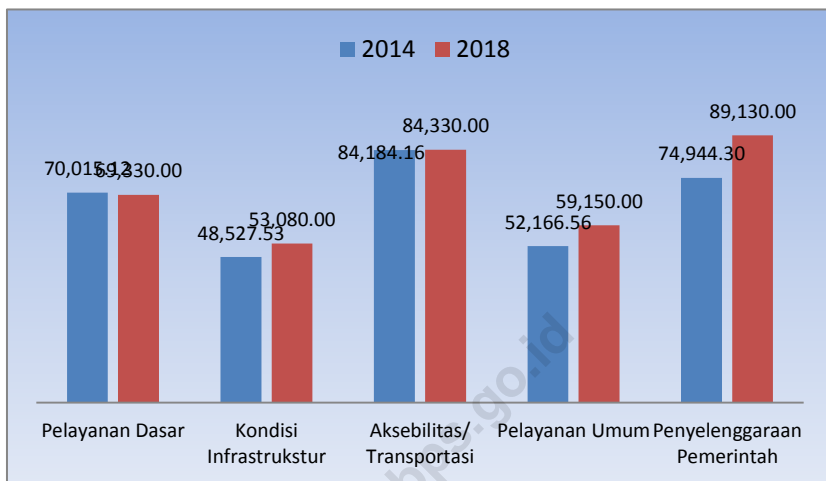
Sedangkan dimensi yang paling rendah yaitu dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai indeks sebesar 53,08.

Nilai dimensi penyelenggaraan pemerintah tinggi dikarenakan SDM aparatur desa yang cukup lengkap dan berkualitas. Sedangkan dimensi aksesibilitas

transportasi tinggi, dimana masyarakat di Kabupaten Semarang mudah untuk mendapatkan akses transportasi, dengan biaya yang relatif murah. Nilai dimensi Kondisi infrastruktur yang relatif rendah dikarenakan di beberapa desa belum terdapat sarana perekonomian seperti kelompok pertokoan, bank dan pusat perekonomian lainnya. Sedangkan variabel lain yang kurang yaitu infrastruktur sanitasi, yaitu di Kabupaten Semarang masih sedikit desa yang mayoritas masyarakatnya menggunakan tangki saptik sebagai pembuangan air tinja. Dimensi pelayanan umum nilainya juga cukup rendah ini disebabkan masih kurangnya fasilitas olahraga yang terdapat di desa. Pada umumnya di Kabupaten Semarang wilayah

desa hanya tersedia fasilitas olahraga tertentu saja. Untuk dimensi pelayanan dasar mempunyai nilai indeks 69,33 dimana masyarakat Kabupaten Semarang dapat mengakses pendidikan dengan cukup mudah, ada beberapa desa yang belum mempunyai fasilitas pendidikan dasar tetapi akses masyarakat desa tersebut ke fasilitas pendidikan dasar masih mudah. Untuk akses kesehatan di tiap desa sudah terdapat layanan kesehatan minimal Pos Kesehatan Desa, tetapi di beberapa desa belum terdapat puskesmas atau poliklinik, tetapi di Kabupaten Semarang hanya terdapat beberapa rumah sakit umum, dan hanya terdapat di kecamatan tertentu saja, yaitu Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Bergas dan Kecamatan Ambarawa.

Dimensi Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 dan 2018



Sumber : Indeks Pembanguana Desa Tahun 2014 dan Tahun 2018

Selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 perkembangan desa cukup lumayan, ini terlihat dari masing – masing dimensi Indeks Pembangunan Desa. Perkembangan masing – masing dimensi selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berbeda beda. Dari lima dimensi tersebut hanya dimensi pelayanan dasar yang mengalami kemunduran, yaitu

Perkembangan pembangunan desa yang secara panel ini dilakukan untuk mengetahui realitas pembangunan desa yang sesungguhnya, dan memperkirakan seberapa besar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dibangun di tingkat desa. Pendataan secara panel yaitu dengan menggunakan objek penelitian yang masih tetap atau sama dengan waktu yang berbeda, untuk melihat perkembangan objek tersebut, dalam hal ini objeknya adalah desa

mengalami kemunduran sebanyak 0,69 poin. Dimensi yang mengalami kenaikan paling tinggi yaitu dimensi penyelenggaraan pemerintah, kenaikannya mencapai 14,19 poin. Beberapa tahun kebelakang Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan seleksi penerimaan sekretaris desa secara terbuka, sehingga kualitas aparat desa di Kabupaten Semarang meningkat secara signifikan, selain itu banyak aset desa yang diperbaiki dan bahkan ditambah agar pelayanan pemerintahan desa semakin baik.

Dimensi lain yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dimensi kondisi infrastruktur dan pelayanan umum. Dimensi kondisi infrastruktur mengalami kenaikan sebesar 4,55 poin. Secara umum kondisi infrastruktur

desa di Kabupaten Semarang belum terlalu memadai dan masih sangat perlu ditingkatkan. Seperti pengadaan penerangan jalan desa, ketersediaan sarana ekonomi sebagai penunjang perekonomian masyarakat di desa tersebut, aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari – hari.

Dimensi pelayanan umum mengalami kenaikan sebesar 6,98 poin. Dimensi ini juga masih cukup rendah sehingga perlu ditingkatkan dengan berbagai program desa nantinya, sehingga di desa tidak ada kejadian wabah penyakit, tidak ada orang yang mengalami gizi buruk, masyarakat tetap sehat dengan tersedianya fasilitas olahraga yang memadai.

Dimensi pelayanan umum dan kondisi infrastruktur masih sangat perlu untuk

dikembangkan, hal ini tercermin dengan nilai ke dua dimensi ini yang masih rendah yaitu sebesar 59,15 dan 53,08. Hal ini perlu perhatian yang lebih di kedua dimensi tersebut, sehingga kedepannya akan berkembang menjadi lebih baik. Dimensi transportasi cenderung masih sama atau tidak berkembang, dengan kenaikan hanya 0,15 poin. Secara umum dimensi transportasi sudah bagus dengan nilai 84,33 yaitu dengan kondisi jalan di desa yang sudah

bagus, akses transportasi masyarakat desa yang mudah dan lainnya. Walaupun dimensi transportasi sudah baik diharapkan kedepannya akan semakin lebih baik lagi.

Dengan memperhatikan nilai masing – masing dimensi, maka perlu perhatian lebih pada dimensi kondisi infrastruktur dan dimensi pelayanan umum. Sehingga perkembangan kedua dimensi tersebut akan signifikan .

Lampiran 1. Indeks Pembangunan Desa (IPD) Menurut Kabupaten, Dimensi IPD, Status IPD, Di Jawa Tengah 2018

Nama Kabupaten	IPD 2018	Dimensi IPD				
		Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cilacap	67,90	64,96	55,82	81,54	60,70	86,42
Banyumas	69,69	67,17	54,69	88,66	60,20	86,04
Purbalingga	66,17	66,83	53,94	85,64	59,61	62,69
Banjarnegara	65,72	63,54	48,13	84,68	57,62	85,68
Kebumen	66,65	65,40	51,30	83,26	58,54	83,04
Purworejo	62,54	59,38	48,99	81,31	51,87	79,00
Wonosobo	64,66	62,74	47,65	83,78	58,79	79,97
Magelang	66,34	67,51	48,45	83,09	57,05	82,22
Boyolali	68,35	68,34	53,77	78,96	61,04	89,66
Klaten	68,50	71,27	55,95	74,89	61,01	84,77
Sukoharjo	71,24	71,84	57,66	83,88	61,03	87,50
Wonogiri	67,59	70,17	49,52	78,93	63,98	84,18
Karanganyar	70,94	70,94	58,13	80,92	65,83	87,07
Sragen	70,76	71,18	58,74	82,45	65,30	80,94
Grobogan	67,79	66,96	56,81	76,76	59,20	87,57
Blora	62,22	64,88	53,70	73,21	53,11	62,58
Rembang	66,52	65,22	56,41	82,17	55,67	75,40
Pati	68,22	67,34	58,57	78,55	56,92	85,24
Kudus	72,47	73,58	62,17	84,52	61,24	81,68
Jepara	70,47	71,32	56,73	83,39	62,06	84,02
Demak	69,36	71,14	58,95	75,84	56,42	89,00
Semarang	69,33	69,33	53,08	84,33	59,15	89,13
Temanggung	66,05	65,33	47,55	84,50	57,38	85,24
Kendal	69,74	67,25	54,86	87,90	59,06	88,36
Batang	66,25	65,76	51,54	81,73	58,16	80,93
Pekalongan	64,78	64,64	51,17	81,03	54,74	76,37
Pemalang	67,98	66,87	53,50	83,78	59,37	83,91
Tegal	68,17	66,67	55,71	84,12	55,85	84,01
Brebes	68,53	67,30	56,64	83,40	57,20	83,35
Jawa Tengah	67,37	66,90	53,72	81,74	58,40	82,53

Sumber : Indeks Pembangunan Desa 2018

Lampiran 2. Jumlah Desa Menurut Status Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Kabupaten Di Jawa Tengah 2018

Nama Kabupaten	Persentase Desa Menurut Status Desa			Jumlah
	Tertinggal	Berkembang	Mandiri	Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cilacap	0,74	82,53	16,73	269
Banyumas	0,00	83,06	16,94	301
Purbalingga	0,00	93,30	6,70	224
Banjarnegara	1,50	86,09	12,41	266
Kebumen	0,00	90,87	9,13	449
Purworejo	1,71	94,67	3,62	469
Wonosobo	1,27	90,25	8,47	236
Magelang	0,00	87,19	12,81	367
Boyolali	0,00	82,38	17,62	261
Klaten	0,00	84,14	15,86	391
Sukoharjo	0,00	69,33	30,67	150
Wonogiri	0,00	88,84	11,16	251
Karanganyar	0,00	72,84	27,16	162
Sragen	0,00	71,43	28,57	196
Grobogan	0,00	84,98	15,02	273
Blora	1,85	94,46	3,69	271
Rembang	0,70	87,46	11,85	287
Pati	0,00	81,05	18,95	401
Kudus	0,00	62,60	37,40	123
Jepara	0,54	70,11	29,35	184
Demak	0,00	84,36	15,64	243
Semarang	0,00	78,85	21,15	208
Temanggung	0,75	91,35	7,89	266
Kendal	0,00	79,32	20,68	266
Batang	0,00	92,05	7,95	239
Pekalongan	5,88	85,66	8,46	272
Pemalang	0,00	85,31	14,69	211
Tegal	0,36	85,05	14,59	281
Brebes	0,00	83,22	16,78	292
Jawa Tengah	0,56	84,93	14,51	7 809

Sumber : Indeks Pembangunan Desa 2018

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Desa 2018*, bps.go.id

Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, *Kabupaten Semarang Dalam Angka 2019*, semarangkab.bps.go.id

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik, *Lampiran Indeks Pembangunan Desa 2014*,



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SEMARANG**

Jl Garuda No 7 Ungaran-50511 Telp/Fax (024) 6921029

<http://semarangkab.bps.go.id> email : bps3322@bps.go.id